

Rakor Pelaksanaan MBG di Kaltim

SAMARINDA - Pejabat (PJ) Gubernur Kaltim Akmal Malik memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Kalimantan Timur di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (10/2).

Acara menghadirkan narasumber Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan, dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Immanuel, pimpinan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kaltim.

Hadir pula secara *hybrid* Kasdam VI Mulawarman Brigjen Ari Ariyanto, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Dr M Sabilul Alif, Kajati Kaltim Dr Iman Wijaya, serta para kepala daerah di Kaltim. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan menjelaskan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang efektif mulai dilaksanakan pada Februari 2025 dengan alokasi Rp71 triliun. "Program nasional ini targetnya akan memberi makan bergizi kepada 82,9 juta orang, terdiri anak-anak sekolah (PAUD-SMA), ibu hamil, ibu menyusui dan balita," jelas Tigor.

Berdasarkan data BGN untuk Kaltim sendiri terdapat 1,2 juta orang yang berhak mendapat layanan MBG. "Sedikitnya diperlukan 450 satuan layanan yang tersebar di 10 kabupaten dan kota se-Kaltim," sebutnya. Per satuan layanan setiap harinya akan memasak 300 kg sayur mayur, sehingga diperlukan minimal 50 orang yang akan melayani 3.000 orang setiap harinya. "Sosialisasi kita hari ini menyampaikan bagaimana mempersiapkan satuan layanan dan SDM-nya, juga ketersediaan bahan pangan," untkapnya.

Pj Gubernur Akmal Malik menegaskan program nasional MBG memerlukan dukungan penuh seperti ketersediaan bahan pangan yang luar biasa besar sehingga perlu menggerakkan sentra-sentra pertanian di Kaltim. "TNI sudah bergerak menyiapkan dapur (satuan layanan), Pemda baik provinsi maupun kabupaten dan kota harus menyiapkan petaninya untuk ketersediaan bahan baku," tegasnya.

Menurut Akmal, program yang digagas Presiden Prabowo sangat bagus dalam mendorong pertanian di seluruh daerah guna ketersediaan bahan pangan. "Ini tantangan buat kita. Terlebih Kaltim selama ini bahan pangannya bergantung dengan daerah lain," bebernya.

Akmal menyebutkan patokan harga dari BGN satu porsi sebesar Rp12 ribu dari Rp10 ribu, namun tetap tidak mencukupi untuk harga di Kaltim yang diperkirakan mencapai Rp17 ribu per porsi. "Supaya tidak mahal biaya hidup kita, Kaltim jangan lagi datangkan bahan-bahan pangan dari seberang," tegasnya.

Tampak hadir Wakil Bupati Kubar Edyanto Arkan, Sekda Paser, Sekda PPU H Tohar, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Disdikbud Kota Samarinda, dan Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara.
(adv/yans/sul/ky)

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Rakor Pelaksanaan MBG di Kaltim, 11/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 18/2012), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui:
 - a. penetapan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
 - b. penyediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
 - c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.
2. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU 18/2012, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif.

